IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI RIAU

Oleh :Wella Wahyuni

Wellawahyuni3@gmail.com

Pembimbing :Adianto

Program Studi Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Providing social education assistance provided by the Riau Province government for students who cannot afford higher education costs, which are channeled through the Riau Province Regional Secretariat for People's Welfare Administration Bureau. This result can be seen from the still not optimal implementation carried out by the People's Welfare Administration Bureau. Researchers here discuss about education development policies in Riau Province (case study of providing social education assistance to students). The implementation of providing social education assistance has several problems in the distribution process at the People's Welfare Administration Bureau. The purpose of this study was to determine the implementation of educational development policies through the provision of educational assistance for students in Riau Province. This research uses a qualitative method using a phenomenological approach. This study uses the theory of Van Metter and Van Horn policy implementation in MeyziHeriyanto, Adianto and HasimAs'ari with indicators of policy size and objectives, policy sources, characteristics or characteristics of implementing agencies/agencies, communication between organizations related to activities implementing activities, implementing attitudes, and the economic, social and political environment. The results showed that the implementation of education development policies through the provision of social education assistance was not optimal. Because it is not in accordance with the criteria that are set and the stated objective of the policy, the lack of information from the government in the implementation of the provision of social education assistance to student applicants who took part in the process of implementation assistance, and the limited ability of the organization to carry out the tasks that had to be done in providing rocks. social education for underprivileged students in Riau Province.

Keywords: Policy, Educational Development, Education Socil Assistance

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komitmen Provinsi Riau terhadap peningkatan pendidikan dapat dilihat melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan visi dan misi Riau yang telah disepakati dan ditetapkan berdasarkan peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Riau. Dengan keberhasilan pencapaian visi yaitu “Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Batin di Asia Tenggara Tahun 2025”. agar setiap tahap pembangunan jangka menengah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kondisi, kemampuan dan harapan yang ditetapkan berdasarkan ukuran-ukuran kinerja pembangunan, telah dirumuskan visi yaitu: “Terwujudnya pembangunan ekonomi yang mapan, melalui kesiapan infrastruktur, peningkatan pembangunan sektor pendidikan, serta memberikan jaminan kehidupan agamis dan pengembangan budaya melayu secara proporsional”.

Terwujudnya visi dan misi pembangunan pemerintahan daerah provinsi Riau salah satunya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan sumberdaya manusia Riau melalui pendidikan, Dalam upaya tersebut perlunya secara berkelanjutan melalui peningkatan kemampuan perguruan tinggi secara lembaga perguruan lainnya pada tatacara pasca pendidikan kejuruan sehingga mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan diwilayah Riau, Dalam hal ini pemerintah memberikan program bantuan sosial pendidikan kepada setiap mahasiswa yang mengalami kendala dalam biaya pendidikan tinggi di

setiap Universitas Povinsi Riau. Pemberian bantuan pendidikan ini, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat yang menangani bantuan sosial pendidikan tidak mampu untuk mahasiswa yang mengalami kendala dalam biaya pendidikan. Dalam Pemberian bantuan sosial pendidikan mengalami kendala dalam verifikasi dan validasi data yang mengajukan proposal perohonan bantuan sosial pendidikan. Dalam pencairan dana bantuan tidak tepat diberikan kepada mahasiswa yang membutuhkan. Masih banyak mahasiswa yang mampu menerima bantuan pendidikan ini, Biro administrasi kesejahteraan rakyat melaksanakan program bantuan sosial pendidikan tinggi yang mana dalam kegiatan verifikasi dan validasi terhadap proposal permohonan dana bantuan sosial pendidikan yang merupakan bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu di Provinsi Riau. Yang dikemukakan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 72 tahun 2018, tentang perubahan peraturan Gubernur Riau Nomor 35 tahun 2017, tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kebijakan pendidikan di daerah dalam konteks otonomi daerah dikaitkan dengan kebijakan publik adalah Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh dewan perwakilan rakyat daerah menurut azaz otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 berkenaan dengan kebijakan pendidikan nasional, terdapat dua hal khusus pertama,

menetapkan alokasi dana pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen baik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kedua, pasal 11 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan baik setiap warga Negara. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 31 ayat (1) telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan aparat dalam merumuskan program atau kebijakan untuk dilaksanakan oleh pemerintah dan kelompok masyarakat yang ikut serta bersama-sama melaksanakan program atau kebijakan yang telah diputuskan, yang harusnya didukung oleh sarana dan prasarana yang ada. Sejalan dengan adanya program pemerintah provinsi riau yang mengarahkan pada kebijakan pembangunan pendidikan yaitu salah satunya bantuan sosial pendidikan sebagai salah satu program yang diberikan untuk mahasiswa perguruan tinggi yang tidak mampu, bantuan program ini diberikan untuk membantu mahasiswa dalam meringankan biaya pendidikan oleh pemerintah. Kebijakan pembangunan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintahan dalam program ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kecerdesan anak bangsa lewat pemberdayaan masyarakat miskin.

Ada beberapa fenomena yang tidak sesuai harapan sehingga membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini antara lain:

1. Kebijakan pemerintah dalam memberikan Bantuan Sosial Pendidikan Kurang Mampu di Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provisi Riau;
2. Persyaratan yang dilakukan dilihat dari prosedur masih lemah karena hanya mengandalkan Surat Keterangan Tidak Mampu dan penijauan lapangan di lakukan hanyalah ke Universitas dan Perguruan Tinggi tanpa bertemu langsung dengan mahasiswa yang bersangkutan sehingga dana bantuan yang di berikan tidak tepat sasaran;
3. Berkaitan dengan adanya dana anggaran pemerintah Daerah Provinsi Riau sehingga dana yang dicairkan tidak keseluruhan mahasiswa yang Tidak Mampu mendapatkannya.
4. Kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah kepada pemohon penerima bantuan sosial pendidikan tentang pemberian bantuan sosial pendidikan tidak mampu di Provinsi Riau.

1.2 RumusanMasalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan pokok pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pembangunan pendidikan melalui pemberian bantuan sosial pendidikan bagi mahasiswa di Provisi Riau?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan pendidikan melalui pemberian bantuan sosial pendidikan bagi mahasiswa di Provinsi Riau?

1.3 TujuanPenelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pembangunan pendidikan melalui pemberian bantuan sosial pendidikan bagi mahasiswa di Provinsi Riau?
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja penghambat pelaksanaan kebijakan pembangunan pendidikan melalui pemberian bantuan sosial pendidikan bagi mahasiswa di Provinsi Riau?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik khususnya Program Study Administrasi Publik, serta menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang membahas permasalahan yang sama.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretarian Daerah Provinsi Riau dalam pelaksanaan penyaluran dana bantuan sosial pendidikan mahasiswa di Provinsi Riau.

2. KONSEP TEORI

2.1 Teori Kebijakan

Kartasasmita dalam **Edy Sutrisno (2009:15)**, mengatakan bahwa kebijakan adalah merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan (1) apa yang dilakukan, (2) apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya, (3) apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut. **Carl Friedrich** dalam

Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Budiadjo dalam **Ali, dkk (2012:12)** menyatakan bahwa kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan –tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan.

2.2 Teori Implementasi Kebijakan

Ripley dan **Franklin** dalam **Winarno (2014:148)** mengemukakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Kinerja sumber daya manusia dapat diartikan lain sebagai prestasi kerja (*performance*).

Grindle dalam **Winarno (2014:149)** memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Merilee S. Grindle dalam **Subarsono (2011: 93)** dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group,

sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakantelah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Van Meter dan Van Horn dalam **Meyzi Heriyanto,Adianto dan Hasim As'ari (2019:57)** mengemukakan implementasi kebijakan oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan untuk keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. Standar dan tujuan kebijakan (*policy standards objectives*)

Ukuran atau standar dan tujuan kebijakan membbberikan perhatian utama pada faktor-faktor yang menentukan hasil kerja merupakan hal penting dalam analisis.

2. Sumber daya kebijakan (*policy resources*)

Bukan hanya standar dan tujuan tetapi juga dalam menjelaskan implementasi kebijakan juga membutuhkan sumber daya yang digunakan untuk memudahkan administrasi.

3. Aktivitas pengamatan dan komunikasi interorganisasional

Suatu implementasi yang efektif memerlukan standar dan tujuan program yang dipahami oleh masing-masing ondividu yang bertanggung jawab agar implementasi tercapai.

4. Karakteristik pelaksanaan

Komponen ini terjadi dari struktur formal organisasi dan atribut-atribut fortmal dari personil selain hubungan pelaksana dengan partisipan dalam sistem penyampaian kebijakan.

5. kondisi ekonomi, sosial dan politik.

Di dalam implemetasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa aspek diantaranya adalah pengaruh ekonomi, sosial dan politik. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan faktor ekonomi, sosial dan politik diantaranya : *pertama*, apakah sumberdaya ekonomi tersedia dalam organisasi pelaksana cukup memadai untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan. *Kedua*, sejauhmana kondisi sosial ekonomi yang akan mempengaruhi pelaksana kebijakan. *Ketiga*, bagaimana sikap umum tentang beberapa jenis masalah kebijakan yang terkait. *Keempat*, apakah kelompok elit menyetujui atau menentang pelaksana kebijakan. *Kelima*, apakah karakteristik partisipan dan organisasi pelaksana ada oposisi atau dukungan parisipan untuk kebijakan tersbut.

6. Disposisi atau sikap pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana sangat menentukan keberhasilan implementasi, sebab hal ini berkaitan dengan persepsi pelaksana dalam yuridis dimana kebijakan disampaikan. Ada tiga unsur yang mempengaruhi pelaksana dalam pengimplementasi kebijakan, yaitu : *pertama*, kognisi (pemahaman dan pengetahuan) pelaksana terhadap kebijakan. *Kedua*, arah respon pelaksana terhadap implementasi penerima atau menolak. *ketiga*, intensitas dari respon pelaksana.

2.3 Teori Pembangunan

Sutopo dalam **Rahmawati (2018)** Indikator yang terdapat dalam konsep pembangunan berkelanjutan adalah adanya keseimbangan antara tiga pilar besar yakni, pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan perlindungan

lingkungan.

Galtung dalam **Triyono (2007:3)** menyatakan bahwa pembangunan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimana metode Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi akan menggali data untuk menemukan makna dari hal-ha mendasar dan esensial dari fenomena, realitas, atau pengalaman yang dialami oleh objek penelitian.

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau. Alasan memilih lokasi tersebut karena adanya pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Pendidikan Tidak Mampu bagi Mahasiswa. Jadi bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan sosial pendidikan tidak mampu di Provinsi Riau.

3.2 Informan Penelitian

Untuk memperoleh informan penelitian, peneliti menggunakan teknik *key person* dan untuk menentukan informan terhadap pelaksana pemberian bantuan sosial pendidikan tidak mampu bagi mahasiswa dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Berikut ini adalah informan dalam penelitian ini:

- a. Kepala biro kesra
- b. Kepala bagian bantuan sosial

pendidikan

- c. Staff bagian bantuan sosial pendidikan
- d. Mahasiswa yang menerima bantuan sosial pendidikan
- e. Mahasiswa yang tidak menerima bantuan sosial pendidikan

3.3 Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam pengumpulan data primer yang didapatkan oleh peneliti selama melakukan observasi di Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau yaitu data yang langsung diperoleh dari informan, data juga diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu pemberian bantuan sosial pendidikan tidak mampu bagi mahasiswa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang digunakan peneliti yaitu terdiri:

- a. Gambaran umum mengenai Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau.
- b. Struktur organisasi di Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau.
- c. Peraturan dan data bantuan sosial pendidikan tidak mampu bagi mahasiswa.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan usaha untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan juga. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat mendalam.

Wawancara yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan pemberian bantuan sosial pendidikan tidak mampu bagi mahasiswa di Provinsi Riau dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemberian bantuan sosial pendidikan di Provinsi Riau. Wawancara dilakukan dari Oktober sampai dengan November 2019.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan peneliti berupa data yang diambil selama melakukan proses observasi, wawancara dan survei bertujuan melengkapi data penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, data dapat berupa file, foto dan lain sebagainya. Adapun data yang didapat misalnya berupa foto. Dokumentasi dilakukan dari Oktober sampai dengan November 2019.

3.5 Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi data diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai sumber data yang telah ada. Teknik triangulasi, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Berikut ini tahapan analisis data model (Creswell, 2016) yaitu:

a. Tahap pertama yang peneliti lakukan adalah mempersiapkan data untuk dianalisis, dengan cara memilah, men-scanning hasil transkrip wawancara dengan informan-informan penelitian. Yang kemudian peneliti lakukan dengan mencatat dan menyusun data ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi. Yang kemudian

peneliti lakukan dengan mencatat dan menyusun data ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi. Tahap pertama ini peneliti lakukan setelah keseluruhan wawancara selesai dilakukan.

b. Tahap selanjutnya, peneliti membaca keseluruhan data untuk membangun informasi yang diperoleh tentang kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dari hasil transkrip wawancara dengan menentukan gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan informan penelitian, bagaimana nada gagasan-gagasan tersebut, dan bagaimana kesan dari kedalaman, penuturan informasi tersebut.

c. Setelah itu peneliti lakukan dengan men-coding data. Yaitu proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Pada tahap ini peneliti mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan saat penelitian berlangsung. Data tulisan tersebut berupa Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tentang Pemberian Bantuan Sosial Pendidikan Tidak Mampu bagi Mahasiswa.

d. Tahap selanjutnya peneliti menghubungkan hasil wawancara dengan teori yang digunakan yaitu teori Implementasi Kebijakan untuk dijadikan suatu rangkaian cerita dalam narasi atau laporan kualitatif.

e. Tahap terakhir peneliti memaknai data, dengan membandingkan antara hasil penelitian dengan informasi yang didapatkan oleh peneliti dari setiap informan.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Program Pemberian Bantuan Sosial Pendidikan dalam Rangka Pembangunan Pendidikan di Provinsi Riau

1.1.1 Standard dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan memiliki kaitan erat dengan para pelaksana. Kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya mengetahui mengenai apa yang menjadi ukuran dan tujuan suatu kebijakan. Suatu ukuran dan tujuan kebijakan harus ideal jelas dan terukur. Dengan demikian indikator ini akan melihat sejauh mana ukuran dan tujuan kebijakan pembangunan yang telah direalisasikan.

Ukuran dan tujuan kebijakan mertinya dirumuskan terlebih dahulu agar

dalam implementasi kebijakan ada persamaan persepsi semua pihak yang terlihat baik itu pemberian bantuan sosial yang dalam hal ini pemerintah daerah maupun penerima bantuan pendidikan yang dalam hal ini adalah mahasiswa.

4.1.2 Sumber-sumber Kebijakan

keberhasilan kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber yang tersedia. Karna bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan suatu kebijakan, jika para personilang bertanggung jawab mengimplementasikan suatu kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

Pelaksanaan penganggaran dan bantuan sosial pendidikan di dasarkan peraturan gubenur nomor 72 tahun 2018 tentang pedoman belanja hibah dan belanja bantua sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pemberia bantuan sosial pendidikan merupakan bantuan sosial pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan mahasiswa yang kususnya tidak mampu, hal ini menjadi suatu perhatian mengingat unuk mengembangkan sumberdaya manusia masyarakat yang akan datang.

4.1.3 Ciri-ciri Sifat Badan atau Instansi Pelaksana

Sumberdaya manusia dalam hal ini adalah staff ataupun anggota yang ada di Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan organisasi adalah faktor sumberdaya manusia. Keberhasilan mutu bersaing suatu organisasi sangat ditentukan oleh mutu sumberdaya manusianya.

Organisasi sektor publik sangat membutuhkan sumberdaya manusia yang kopeten, memiliki kopetensi tertentu yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pekerjaannya.

kurangnya kebijakan pemerintah dalam tenaga yang ada dalam sumberdaya manusia yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial pendidikan, dimana pelaksanaan memerlukan monitoring verifikasi satu persatu permohonan mahasiswa apakah layak mendapatkan bantuan ini.

Rapat koordinasi untuk menetapkan proses pelaksanaan dari kebijakan pembangunan bantuan sosial pendidikan. Dalam pelaksanaan bantuan sosial pendidikan, adanya perencanaan yang baik agar optimalnya kegiatan sampai akhir. Dalam rapat tersebut pihak Pemerintah dan Universitas melakukan perencanaan yang berisikan bagaimana alur, peyusunan tim, penganggaran, seleksi persyaratan, pengajuan proposal, dan juga pertanggung jawabannya dalam pelaksanaannya.

4.1.4 Komunikasi antar Organisasi terkait dengan Kegiatan – kegiatan Pelaksanaan

Agar kebijakan bisa dilaksanakan dengan efektif, para individu harus memahami apa standar tujuan. Yang bertanggung jawab dalam pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karna standar dan tujuan kebijakan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi.

Jika tidak ada kejelasan dan konsisten dalam standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan sulit

untuk dicapai. Dengan demikian, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks.

Dengan demikian, prospek kebijakan yang efektif. Sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten. Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya. Komunikasi antar organisasi adalah koordinasi komunikasi yang terjadi pada Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dengan pihak penerima bantuan pendidikan serta pemerintah yang terkait lainnya dalam melaksanakan kebijakan bantuan sosial pendidikan tidak mampu.

4.1.5 Sikap Para Pelaksana

Sikap pelaksana kebijakan dapat dilihat melalui pemahaman dan pendalaman, arah respon kebijakan, dan intensitas kebijakan. Jika pelaksanaan ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pelaksana kebijakan memiliki pengaruh yang tinggi pada tingkat keberhasilan suatu kebijakan. Pemahaman tentang standar dan tujuan kebijakan adalah penting, karna dengan pemahaman yang tinggi suatu kebijakan yang berhasil dapat gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menguasai standar dan tujuan kebijakan tersebut.

Sikap para pelaksana pihak pemerintah dalam kebijakan pemberian bantuan pendidikan dilihat melalui proses verifikasi

dan validasi proses seleksi bantuan pendidikan ini, pelaksana melakukan satu persatu proses untuk disalurkannya pemberian bantuan pendidikan dengan bantuan instansi-istansi lainnya. Dari proses pelaksanaan kebijakan ini para pelaksana dengan teliti memilih permohonan yang layak mendapatkan bantuan pendidikan dengan kebijakan yang sudah ditentukan.

4.1.6 Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Melihat penilaian kinerja kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendukung keberhasilan kebijakan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja kebijakan. Karena itu, upaya kebijakan masyarakat kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dalam hal ini yaitu, sejauh mana lingkungan mendukung kebijakan bantuan pendidikan ini.

kondisi lingkungan sosial sangat mendukung dengan adanya bantuan pendidikan ini, dimana dengan adanya bantuan seperti ini diharapkan dapat meringankan biaya pendidikan bagi mahasiswa. Selain lingkungan sosial, ada juga lingkungan ekonomi yang mendukung dari kebijakan bantuan pendidikan ini, lingkungan ekonomi adalah bentuk perhatian pemerintah tentang biaya pendidikan yang sangat tinggi bagi mahasiswa di Provinsi Riau. Dan yang terakhir lingkungan politik, dalam hal ini hubungan lingkungan politik dengan kebijakan bantuan pendidikan membahas bagaimana partisipasi pemerintah setempat terhadap bantuan pendidikan ini. Dan pengaruh dari lingkungan politik ini terhadap kebijakan bantuan pendidikan.

5.2 Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Pendidikan di Provinsi Riau

5.2.1 Informasi

Informasi merupakan kesatuan orang, data, prosedur, dan perangkat teknologi informasi yang saling berinteraksi untuk mengolah data menjadi informasi untuk mendukung tujuan organisasi. Bagi instansi pemerintah, informasi adalah sebuah kebutuhan yang tidak bisa dihindari, terlebih dengan semakin banyaknya yang harus dilayani dalam waktu yang singkat, tidak bisa dimungkinkan bahwa informasi harus ada.

Prosedur pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Pendidikan yang dijalankan Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dalam penyelenggaraan kegiatan rapat koordinasi dengan Universitas yang ada di provinsi Riau dari segi transparansi sistem informasi yang kurang kepada pemohon yang menerima Bantuan Sosial Pendidikan.

5.2.2 Keterbatasan Kemampuan Organisasi

Kemampuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugas apa yang harus dilakukan, dengan menekankan profesionalitas suatu organisasi yang akan memberikan dampak yang baik dalam sebuah pencapaian suatu kegiatan yang dijalankan. Dalam kebijakan bantuan sosial pendidikan hal yang diutamakan yaitu kemampuan dalam sumberdaya yang merupakan suatu kemampuan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, dengan adanya daya fikir yang baik tentu akan memberikan dampak yang baik dalam proses pelaksanaan sebuah kebijakan. Untuk kebijakan yang berlangsung ditujukan kepada mahasiswa agar hubungan antara pihak pemerintah dengan Universitas dan Perguruan Tinggi terjaga dengan baik

sehingga terkendalinya pemberian bantuan sosial pendidikan dan tepat sasaran dana yang diberikan.

keterkaitan tim dalam kebijakan pelaksanaan bantuan pendidikan juga ikut sertakan Universitas dan Perguruan Tinggi tetapi hal ini pelaksanaan secara teknis dikerjakan di lingkungan Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat, tetapi perlunya peninjauan ulang dalam peraturan kewenangan dalam pembagian tugas terhadap kendala yang dihadapi dalam proses bantuan sosial pendidikan.

6. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai pelaksanaan pemberian bantuan sosial pendidikan tidak mampu bagi mahasiswa di Provinsi Riau dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pembangunan pendidikan melalui pemberian bantuan tidak mampu bagi mahasiswa di Provinsi Riau adalah Belum optimal, hal ini disimpulkan bahawa Standar dan tujuan kebijakan masih tidak sesuai dengan kriteria yang menjadi ukuran dan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan, sedangkan sumber daya kebijakan dalam proses pemberian bantuan sosial pendidikan tidak mampu bagi mahasiswa di biro administrasi kesejahteraan rakyat sebagai perangkat daerah yang diberikan tugas dan wewenang untuk melaksanakan kebijakan bantuan dan hibah memiliki sumber daya manusia yang cukup dalam kualitas dan kuantitas. Dalam pengamatan dan komunikasi organisasi tidak terkordinasi dengan sempurna sehingga pihak penerima bantuan sosial pendidikan tidak

paham dengan kebijakan bantuan tersebut, sedangkan kondisi ekonomi, sosial dan politik ikut mendukung dalam mewujudkan kebijakan pembangunan bantuan sosial pendidikan tidak mampu bagi mahasiswa di Provinsi Riau.

b. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pembangunan pendidikan tidak mampu bagi mahasiswa dapat dilihat dari informasi yang disampaikan ke calon penerima dan kemampuan organisasi terhadap kegiatan bantuan sosial pendidikan tidak mampu bagi mahasiswa belum berjalan dengan baik. Hal ini dilihat belum efektif dilaksanakan proses tahapan penyeleksian dan penyaluran dana yang dilakukan oleh Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

6.1 Saran

Dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan pemberian bantuan sosial pendidikan tidak mampu bagi mahasiswa di Provinsi Riau penulis memberikan saran sebagai berikut:

a. Untuk pelaksanaan kebijakan pembangunan pendidikan pemberian bantuan sosial pendidikan tidak mampu bagi mahasiswa yang dilakukan melalui Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dalam proses monitoring dan evaluasi sebaiknya dilakukan penambahan tim dalam pelaksanaannya serta ditingkatkan lagi kinerjanya dan di percepat dalam pelaksanaannya sehingga target sasarnya tepat pada waktu yang telah ditetapkan daerah yang melakukan permohonan dapat di survey guna menghindari tidak tepat sasarnya pemberian dana bantuan sosial ini.

b. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan pembangunan pendidikan pemberian bantuan sosial

pendidikan tidak mampu bagi mahasiswa di Provinsi Riau. Yang mana Komunikasi antara pemerintah dan penerima bantuan sosial pendidikan dalam kejelasan dan kepastian penerimaan dana hibah harus ada sosialisasi terhadap penerima/pemohon bantuan hibah terkait pertanggung jawaban yang mereka buat setelah penerimaan diberikan yang harus mereka penuhi, karna hibah bidang pendidikan ini bersifat untuk meringankan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang tidak mampu di Provinsi Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, Leo, Carl Friedrich (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Bungin, Burhan. (2004). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*(1-4 ed.). Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (4th ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunawan, Imam. (2013) *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: BumiAksara.
- Heriyanto, Meyzi, Adianto dan Hasim As'ari. (2019). *Model Implementasi Program CSR Di Indonesia*. Taman Karya, Pekanbaru.
- Islamy. (2009). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, Lexy J. (2011).*Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosda karya Bandung.
- Mulyadi, Deddy. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Muzzamil, As'ad. (2016). *Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan Dari Orde Lama Sampai Orde Baru*. Jurnal Kependidikan Islam, Vol. 2, No. 2, Desember 2016.
- Nasution.(2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Novianti, Ivana Asthari. (2015). *Kebijakan Pengelolaan Tarif Pelabuhan Terminal Khusus PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit II Dumai*.Skripsi.Pekanbaru: Unri.
- Nugroho.(2003). *Public Policy*.Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Purwanto, Agus B. (2013). *Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Daerah Perbatasan Antar Negara (Studi di Kabupaten Sambas)*.
- Sam M. Chan, Tuti T. Sam. (2006). *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Siagian. 1994. *Pokok-Pokok Pembangunan Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Gava Media
- Sugiyono.(2017). *Metode Penelitian Kualitatif* (3rd ed.). Bandung: Alfa Beta.
- Sujianto.(2008). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik*. Pekanbaru: Alaf Riau
- Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tahir, Anderson. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Wahab. Solihin Abdul. (2008).*Analisis Kebijakan dari Formulasi Keimplementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik; Teori, Proses dan studi kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Dokumen :

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 berkenaan dengan Kebijakan Pendidikan Nasional

Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan AtAS Peraturan Gubernur Noor 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Jurnal :

Hisban (2017).
Kontribusi Kebijakan desentralisasi Pendidikan terhadap Lembaga Pendidikan Islam di Kota Palopo. *Jurnal kebijakan pembangunan pendidikan*, 5, 1-117.

Mahyudi Syafei (2014).
Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di Kabupaten Kayong Utara. *Jurnal kebijakan*, 1 (1) : 34-45.

Eko Setiyawan (2012).
Implementasi Kebijakan Bantuan Pendidikan (Studi tentang Kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11A Tahun 2012). *Jurnal kebijakan pendidikan*, 21 (2) : 1-14.

Toha Luqoni (2012).
Implementasi Kebijakan Pendidikan tentang Aksesibilitas Umum Anggaran bagi Penduduk Kurang Mampu di Kota Malang, *jurnal pembangunan pendidikan*, 12(2) : 33-40